



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

1	2	3	4	5	6	✓	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	✓	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut
----------	------	----------	----------	------	------	----------------	----------------	------	----------	--------------	---------	-------------------	--------------

Penggunaan Dana Parpol akan Diaudit BPK

JAKARTA, MERCUSUAR - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan penggunaan dana bantuan partai politik akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mempertanggungjawabkan alokasinya.

"Nanti diaudit oleh BPK setiap tahun. Jika saat diaudit tidak benar penggunaannya, bisa saja bantuan tahun selanjutnya dihentikan," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan penggunaan dana bantuan partai politik yang rencananya akan ditingkatkan dari saat ini sebesar Rp108 per perolehan suara menjadi Rp1.000 per perolehan suara, mulai tahun depan, penggunaannya hanya untuk kepentingan partai secara umum.

Contohnya, untuk biaya proses kaderisasi dan kegiatan-kegiatan partai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dana bantuan dari negara itu tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam parpol.

"Semua pengeluarannya harus tercatat," jelas Tjahjo. ANT

Jika saat diaudit tidak benar penggunaannya, bisa saja bantuan tahun selanjutnya dihentikan.

TJAHJO KUMOLO
Menteri Dalam Negeri



Wakil Ketua DPR Tjahjo Kumolo (kiri) menyamakan pemelototi berkantor/fasei dengan MK. Foto: ANAA